

## BAB V

### KESIMPULAN

Masyarakat Riau ingin keluar dari Sumatera Tengah adalah karena adanya dominasi kekuasaan dari pemerintahan Sumatera Tengah terhadap kebijakan di daerah Riau. pemerintahan Sumatera Tengah membagi kabupaten yang tidak seimbang anataradaerah di Sumatera Tengah., jumlah kabupaten di Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan dengan Riau. adanya pembagian jabatan strategis di dalam pemerintahan daerah yang tidak seimbang, jabatan strategis tersebut lebih didominasi oleh orang Sumatera Barat dibandingkan daerah Riau dan Jambi. Dominasi lainnya yaitu tidak seimbangnya pembangunan pendidikan di Sumatera Tengah tahun 1950-an, di Sumatera Barat sudah ada beberapa Fakultas yang berdiri sedangkan Riau untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) belum tersedia.

Kebijakan Pemerintahan Sumatera Tengah tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan menghasilkan tuntutan-tuntutan dari kalangan masyarakat Riau untuk keluar dari Pemerintahan Sumatera Tengah dan bahkan berujung dengan tuntutan membentuk provinsi sendiri yang dipimpin oleh putera daerah Riau sendiri. Ketidakpuasan ini menghasilkan tuntutan-tuntutan dari kalangan masyarakat Riau untuk keluar dari Pemerintahan Sumatera Tengah dan bahkan berujung dengan tuntutan membentuk provinsi sendiri yang dipimpin oleh putera daerah Riau sendiri. Perjuangan untuk keluar dari Pemerintahan Sumatera Tengah dimulai dari munculnya kaum terpelajar sebagai agen yang memperjuangkan keinginan masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah.

Kaum terpelajar umumnya terdiri dari murid-murid setingkat SLTP, SLTA, dan mahasiswa. Mereka ini adalah sekelompok warga masyarakat yang telah menyadari adanya ketimpangan dalam pembangunan daerah serta pembagian jatah daerah. Sementara itu, kelompok tokoh politisi Riau mulai matang dalam kancah perpolitikan. Beberapa putra daerah Riau mewakili rakyat Riau dan duduk di Parlemen. Di antaranya yaitu: Ma'rifat Marjani, Umar Amin Husein, dan Hanafi. Perjuangan keluar dari Sumatera Tengah dilakukan dari kongres ke kongres, pembentukan Badan Penghubung Persiapan Provinsi Riau (P3R) oleh delegasi 4 Kabupaten yang diketuai oleh Wan Ghalib sampai dengan perjuangan parlemen yang di wakili Ma'rifat Marjani di Pusat. Perjuangan masyarakat Riau ini bukan hanya sekedar ingin keluar dari Sumatera Tengah, tapi membentuk daerah otonomi Tingkat I Provinsi Riau.

Perjuangan masyarakat Riau untuk keluar dari Sumatera Tengah, seiring dengan lahirnya gerakan daerah menentang pemerintahan pusat yang dikenal dengan Dewan Benteng yang dikepalai oleh Ahmad Husain. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau juga tidak terlepas dari tindakan Dewan Benteng pada tanggal 7 Januari 1957 yang memutuskan untuk memberikan status otonomi daerah Tingkat I untuk Provinsi Riau dan Jambi. Pada tanggal 6 September 1957 Dewan Benteng meresmikan pembentukan tiga provinsi di Sumatera Tengah. Tindakan Dewan Benteng yang memproklamkan berdirinya PRRI, membuat pemerintahan pusat di Jakarta segera mengambil langkah untuk menghentikan pemberontakan daerah tersebut dan memutuskan untuk segera merealisasikan UU Darurat No.19 Tahun 1957, dengan tujuan memecah kekuatan PRRI.

Pascakeluar dari Sumatera Tengah terjadi pembangunan dalam berbagai aspek di Provinsi Riau, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Kemajuan pembangunan infrastruktur daerah lebih berorientasi pada pembangunan jembatan dan jalan yang berhubungan dengan jalan untuk mengangkut komoditi minyak dan gas yang terdapat disepanjang jalan Dumai, Duri, Minas, dan Kampar. dalam sektor ekonomi juga mengalami perkembangan, sumber daya alam Riau memberikan sumbangan terhadap pembangunan Indonesia, terutama dari sektor minyak. Sementara eksploitasi di Riau memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat, namun bagi daerah Riau sendiri menyengsarakan kehidupan masyarakat Riau. Pembangunan fasilitas pendidikan di Provinsi Riau memang meningkat, tetapi yang menjadi kendala adalah jumlah sekolah yang ada tidak seimbang dengan jumlah tenaga pengajar yang tersedia. Universitas yang ada belum mampu mencetak lulusan profesional.

Pemerintah pusat memainkan monopoli kekuasaannya, dengan mendominasi dalam pembangunan politik dan ekonomi di Provinsi Riau. masyarakat Riau kehilangan hak-hak politiknya sejak Riau berdiri menjadi sebuah provinsi, gubernur Riau yang diangkat adalah orang-orang pilihan pemerintah pusat dan puncaknya sesudah Ismail Suko (putra daerah) yang dicalonkan oleh DPRD Tingkat I Riau disingkirkan oleh LB. Moerdani yang lebih dikenal dengan peristiwa 2 September 1985. Begitu juga dengan penempatan jabatan pemerintah daerah dan jabatan legislatif baik ditingkat Pemerintahan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Provinsi Riau didominasi oleh orang-orang yang bukan putra daerah Riau.



Sementara itu monopoli kekuasaan pemerintahan pusat atas ekonomi daerah Riau terlihat dari pengelolaan penguasaan sumber daya alam setempat lebih banyak diserahkan kepada masyarakat pendatang, baik asing maupun pribumi tanpa banyak melibatkan masyarakat lokal dan pemerintahan daerah. pemerintahan pusat memberi izin kepada perusahaan-perusahaan swasta melakukan eksploitasi atas sumber daya alam Riau. sementara bagi masyarakat Riau sendiri tidak mendapatkan untung bahkan tanah-tanah masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan yang melakukan investasi di Riau.

Sadarkan akan minimnya pendapatan dari sektor minyak yang melimpah ruah di Riau maka secara historis beberapa langkah yang diambil oleh masyarakat daerah dan pemerintah daerah dimulai pada tahun 1960 Wan Ghalib selaku pemuka masyarakat Riau telah menghadap Chairul Saleh selaku Menteri Pertambangan untuk meminta jatah minyak untuk Riau. Permohonan ini diulang lagi oleh Wan Ghalib pada tahun 1961, akan tetapi dengan tegas Chairul Saleh menyatakan Masalah minyak tidak boleh dibicarakan di daerah dan dinyatakan pula secara lisan bahwa Riau tidak berhak untuk mendapatkan jatah minyak ini.

Salah satu utamanya mengapa demikian dapat ditemukan pada Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang No 44 Tahun 1960. Kedua undang-undang tersebut menentukan bahwa minyak dan gas bumi yang terkandung dalam bumi Indonesia adalah milik negara dan hanya dan hanya dapat diusahakan oleh negara atau perusahaan yang ditunjukan oleh negara. Karena ketentuan tersebut maka semua hasil minyak Provinsi Riau adalah hak milik pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah tidak diperkenankan untuk

menerima secara langsung hasil produksi minyak yang dihasilkan oleh Provinsi tersebut. Ketika Riau masih bisa bersuara lantang menuntut ketidakadilan yang terjadi. Namun ketika berpisah dari Provinsi Sumatera Tengah Riau tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan kuatnya dominasi pemerintahan pusat melalui kebijakan yang dibuat.

